

## KILAS KEBIJAKAN PSPK

# Membangun Keahlian dengan Profesionalisme di Kampus Merdeka: Kajian mengenai Beban Kerja Dosen di Indonesia

Shofwan Al Banna, Inaya Rakhmani dan Daya C. Sukmajati

## Pendahuluan: Pentingnya Bekerja dengan Baik

Di seluruh dunia, pendidikan tinggi mengalami restrukturisasi dan transformasi akibat pandemi dan semakin derasnya arus pasar bebas. Di kawasan Asia, negara-negara yang tanggap menghadapi krisis multidimensi, seperti Singapura (Abdullah dan Kim 2020) dan Korea Selatan, adalah mereka yang juga mendengarkan rekomendasi ilmiah dari perguruan tinggi. Di saat sama, negara-negara ini juga memiliki produktivitas pengetahuan dan daya saing yang tinggi. Lebih mendalam lagi, produksi pengetahuan dan riset pada negara dengan daya tahan ekonomi yang kuat, adalah negara yang membangun perekonomian secara berkelanjutan, berdasarkan riset dan inovasi, dengan komunitas akademik, pembuat kebijakan dan sektor privat yang mau mengantisipasi krisis sosial dan ekonomi yang belum terlihat pada masa kini (lihat lebih lanjut rencana riset dan inovasi nasional Singapura disini)

Studi *Doing Research Assessment* (Rakhmani dan Shakiyya 2019) bahkan menunjukkan terdapat hubungan yang timbal balik antara sektor ilmu pengetahuan di Indonesia dengan pemerintah. Berdasarkan studi tersebut, mayoritas pemangku kebijakan mengaku merasa diuntungkan dengan produk riset dalam pengambilan keputusan. Namun, keahlian dan keunggulan ilmu pengetahuan tidak serta merta terbentuk. Ia perlu dibangun melalui proses panjang internalisasi kebiasaan berkarya secara akademik—pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat—yang didukung oleh instrumen tata kelola baik dan insentif yang akuntabel. Laporan dari Knowledge Sector Initiatives dan UI-CSGAR (2019) menyebutkan bahwa tata kelola perguruan tinggi adalah faktor yang esensial untuk mendorong “luaran/kinerja yang ditetapkan” oleh perguruan tinggi.

Oleh karena itu, pada tahun 2020, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka mempunyai empat cakupan kebijakan yakni penyerahan sistem akreditasi perguruan tinggi, hak belajar untuk mahasiswa selama tiga semester di luar prodi, otonomi untuk membuat prodi baru dan kemudahan untuk transisi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) (situs resmi Kampus Merdeka).

Sebagai bagian dari kebijakan ini, Kemendikbudristek melakukan proses penyempurnaan Beban Kerja Dosen (BKD), atau yang juga sering disebut sebagai deskripsi kerja (Undang-Undang Guru dan Dosen, pasal 72 ayat 1), indikator kompetensi, tugas dan tanggung jawab (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pasal 12). Pada dasarnya, BKD memiliki fungsi mengukur kinerja dosen, sehingga ada alat ukur objektif bagi jumlah jam kerja, tipe pekerjaan, dan indikator keberhasilan para dosen. Pada proses penyempurnaan kebijakan ini terdapat dua perubahan utama. Pertama, perubahan dalam komponen penilaian BKD dan bobot-bobotnya untuk menyesuaikan dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Kedua, direncanakan pula sebuah mekanisme pengumpulan berbasis digital yang bertujuan untuk mereduksi beban administrasi dosen.

Studi kebijakan ini bertujuan untuk melakukan telaah kritis atas kebijakan-kebijakan dan rencana kebijakan yang berkaitan dengan BKD tersebut.

## Masalah Struktural dan Solusi Teknis pada Beban Kerja Dosen

**Permasalahan struktural pertama yang berdampak pada produktivitas dosen adalah permasalahan pendanaan riset.** Skema pendanaan penelitian yang didanai oleh pemerintah Indonesia saat ini tidak mampu menopang skema penelitian yang sifatnya multi-tahun. Hal ini disebabkan siklus APBN yang sifatnya tahunan sehingga menyulitkan dosen untuk merancang riset jangka panjang (Prasemiatarti et.al 2018).

Berdasarkan data terakhir UNESCO, besarnya anggaran riset yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia di (0,1% di tahun 2021) juga masih sangat rendah bila dibandingkan dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara (Thailand: 0,5%, Malaysia: 1,3%, dan Singapura 2,1%). Di tahun 2019, ALMI merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk mengelola Dana Abadi Penelitian yang bertujuan untuk mengelola portfolio investasi untuk pendanaan penelitian, menentukan prioritas riset jangka panjang, dan manajemen seleksi proposal penelitian

Selain permasalahan alokasi pendanaan riset, birokratisasi dana penelitian dari pemerintah juga mempersempit ruang dosen untuk melakukan riset yang substansial. Hal ini disebabkan pendanaan dari pemerintah mengikuti ketentuan dari Kementerian Keuangan yang mempunyai siklus satu tahun pelaporan. Alokasi pendanaan riset di atas tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga hanya sedikit pendanaan yang dialokasikan untuk dosen peneliti muda. Untuk menjawab permasalahan tersebut, di tahun 2016 Kementerian Keuangan menerbitkan peraturan standar biaya berbasis keluaran (SBK) untuk penelitian yang memungkinkan dosen untuk melakukan penelitian multi-tahun.

Ketentuan keuangan yang tidak fleksibel juga tidak hanya berdampak pada siklus anggaran, tapi juga pada pelaksanaan penelitian. Peraturan keuangan yang ada seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian, yang tidak bisa diperlakukan sama seperti kegiatan yang lain. Sering ada keluhan dari para dosen bahwa lebih sulit untuk mempersiapkan laporan keuangan daripada melakukan penelitiannya sendiri.

**Permasalahan struktural kedua adalah praktik kerja dosen yang dibebankan pada aspek pengajaran.** Kegiatan perguruan tinggi di Indonesia bermuara pada tiga kegiatan utama yang disebut tri dharma perguruan tinggi yakni pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Di sistem pendidikan tinggi Indonesia yang semakin neoliberal setelah tahun

2000an, dosen dituntut untuk mengajar lebih banyak untuk mengimbangi jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi (Rakhmani dan Siregar 2016).

Di tataran ideal, kebijakan Kampus Merdeka bertujuan salah satunya untuk mendukung diferensiasi misi di perguruan tinggi - beserta civitas akademiknya. Artinya, ketiga dharma tersebut tidak harus berjalan terpisah - dan dosen dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan aspirasinya. Dosen didorong untuk berkegiatan di luar kampus, serta diberikan insentif atas pencapaian riset dan inovasi. Pada arah kebijakan BKD tahun 2021, disebutkan bahwa capaian BKD ditujukan untuk dapat berkontribusi pada capaian perguruan tinggi. Sehingga, rubrik kegiatan BKD disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, khususnya IKU nomor 5. Artinya, aktivitas-aktivitas tri dharma dosen dirincikan sesuai dengan tingkat dampaknya. Sekilas, arah kebijakan BKD tahun 2021 ini berusaha menstimulasi dosen untuk melakukan lebih banyak riset, inovasi dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi dengan memberikan insentif beban kerja dosen.

Di sisi lain karier dan kenaikan pangkat dosen diukur berdasarkan bobot per kegiatan tri dharma, dan mempunyai bobot yang berbeda di setiap tingkat kepangkatan (diatur dalam Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Dosen). Semakin tinggi jabatan akademik, semakin sedikit jam untuk mengajar dan semakin banyak pula kesempatan untuk melakukan penelitian. Dosen junior (dengan tingkatan asisten ahli) memiliki lebih sedikit kesempatan untuk penelitian, tidak hanya karena profil jabatan akademiknya tidak memenuhi untuk proposal penelitian namun juga karena tuntutan jam mengajar yang lebih banyak (RCA 2017). Jika tuntutan beban kerja dosen tersebut tidak dipenuhi sesuai dengan target kumulatif tentu akan berpengaruh pada proses kenaikan pangkat dosen tersebut.

**Permasalahan ketiga, pola kebijakan sumber daya yang rumit di tingkat perguruan tinggi tidak terlepas dari kebijakan pusat yang masih berorientasi compliance dan kerap kali tidak selaras satu sama lain.** Di tahun 2020, Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan Indikator Kinerja Utama, yang salah satu indikator keberhasilannya adalah persentase dosen berlatar belakang praktisi yang mengajar di perguruan tinggi. Kebijakan ini kontradiktif dengan kebijakan akreditasi yang justru mensyaratkan dosen yang memiliki sertifikasi dosen (serdos)

ketimbang dosen praktisi. Di sisi lain, akreditasi menjadi target yang harus dicapai secara kolektif khususnya oleh perguruan tinggi swasta. Hal ini dikarenakan status akreditasi menjadi 'standar kualitas' yang dipakai perguruan tinggi untuk dapat merekrut lebih banyak mahasiswa (RCA 2017)

Pengelolaan sumber daya universitas yang sentralistik (diatur oleh negara) berimplikasi kepada proses kenaikan pangkat yang bergantung pada syarat-syarat administratif. Hingga saat ini pengelolaan SDM di perguruan tinggi masih berorientasi pada compliance ketimbang luaran atau dampak yang dihasilkan oleh kerja dosen (Rakhmani dan Siregar 2016)

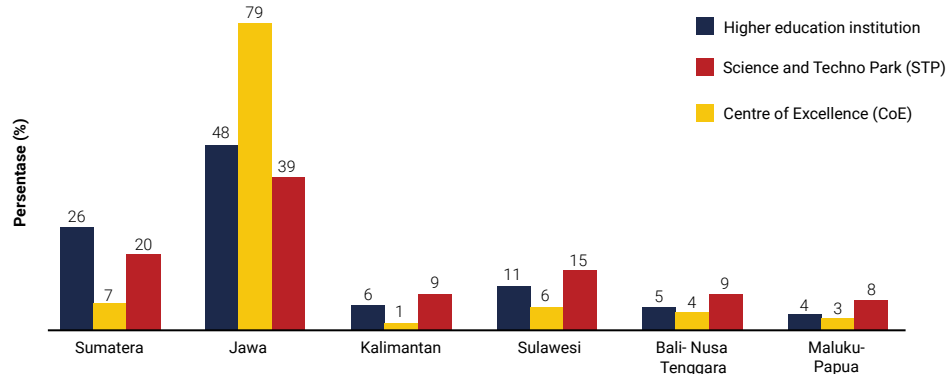
Contoh yang paling riil untuk mengajukan kenaikan pangkat seorang dosen dinilai dari berkas ijazah, sertifikat mengikuti konferensi bahkan latar belakang profesi orang tua. Pengisian berkas dalam jumlah banyak ini tidak hanya pada satu platform, tapi ke beberapa platform yang berbeda. Kepala program studi dan dosen-dosen junior adalah pihak yang paling terdampak dengan beban kerja administrasi<sup>1</sup>.

**Permasalahan keempat, kebijakan Beban Kerja Dosen meskipun kerap kali mengalami perubahan, hingga saat ini tidak sensitif dengan kenyataan adanya relasi kuasa di lapangan.** Permasalahan ini mendorong kerja-kerja yang teralienasi, pada contoh yang paling konkret adalah pemisahan peran dosen praktisi, tetap non-tetap, dan dosen peneliti. Tidak jarang pemilihan personil kerja penelitian didasarkan latar belakang etnisitas dan senioritas di perguruan tinggi (RCA 2017).

Rekrutmen dan kenaikan pangkat dosen kerap kali bergantung pada dua faktor yakni tingkat senioritas dan kedekatan dosen dengan level pimpinan di perguruan tinggi. Untuk menjadi dosen tetap, di banyak kampus masih terjadi sistem 'urut kacang', artinya dosen tidak tetap perlu menunggu untuk mengikuti seleksi atau diangkat menjadi dosen tetap berdasarkan dua faktor di atas (RCA 2017, Sukmajati 2015). Hal ini menyebabkan situasi ketidakpastian karier bagi dosen di lingkungan perguruan tinggi (Nugroho et.al 2016). Bagi beberapa kampus, sistem rekrutmen sering kali tidak dibuat terbuka (tidak merekrut orang-orang baru) untuk "menjaga kultur kampus".

Isu ketimpangan tidak hanya terjadi di dalam kampus, namun juga pada alokasi sumber daya riset di perguruan tinggi berbagai daerah di Indonesia. Pada grafik di bawah ini, keberadaan institusi produksi ilmu pengetahuan (perguruan tinggi, science and techno park dan Pusat Unggulan Iptek) masih didominasi di Pulau Jawa. . Terpusatnya produksi ilmu pengetahuan di Pulau Jawa tidak terlepas dari kebutuhan pemangku kebijakan yang terpusat di Jakarta akan riset untuk melegitimasi keputusannya (Hadiz dan Dhakidae 2005).

**Gambar 1. Sebaran Infrastruktur penelitian di Indonesia (2015)**



Sumber: Kementerian Ristekdikti RI (2016); Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi dan Penunjang Lainnya (2017)

Ketiga institusi yang dikelola dibawah Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi ketika itu (kini tata kelolanya digabung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kemendikbudristek) ini berfungsi untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan menjadi inovasi yang dapat berkontribusi pada ekonomi (knowledge based economy). Isu ketimpangan ini lebih jauh akan berimplikasi pada ketimpangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya mempengaruhi kualitas riset dan pengajaran perguruan tinggi itu sendiri, tetapi juga keberlanjutannya (CIPG 2020).

<sup>1</sup>Berdasarkan *feedback loop* PSPK yang dikumpulkan sepanjang tahun 2020 - 2021 melalui wawancara dan FGD dengan dosen di berbagai perguruan tinggi Indonesia. Pada tahun 2017 RCA melalui penelitian melaporkan dosen, khususnya dosen muda, mengalami beban kerja administratif yang tinggi.

## BKD Baru: Gagasan Bagus di Tengah Sistem Birokrasi Eksesif

Merespon berbagai kritik pada kebijakan BKD yang ada, Direktorat Sumber Daya Manusia Kemdikbudristek mendorong dua kebijakan utama untuk melakukan reformasi dalam bidang ini. Kebijakan pertama adalah pengubahan rubrik BKD (atau sering disosialisasikan sebagai "BKD Baru"), yang mengubah komposisi dan bobot indikator-indikator dalam rubrik BKD. Kebijakan kedua adalah integrasi sistem informasi yang berkaitan dengan dosen dalam SISTER. Kebijakan beban kerja dosen baru ditujukan untuk memberikan bobot lebih besar pada indikator-indikator yang mendorong kebijakan kampus merdeka. Hal ini tercermin pada bobot tiap aspek kegiatan tidak lagi timpang hanya kepada bobot riset dan publikasi. Kebijakan BKD yang baru membuka peluang untuk mendorong dosen mengembangkan potensi dan minatnya. Menurut salah satu penyusun rubrik BKD, Eko Hadi Sujiono<sup>2</sup>, rubrik BKD yang baru saat ini dibuat untuk "berorientasi hasil (*output* dan *outcome*) alih-alih proses. Sebagai ilustrasi, yang dapat dilaporkan oleh dosen sebagai kredit adalah hasil penelitian bukan kegiatannya. Selain itu bobot kerja dosen saat ini juga tidak dikaitkan dengan kepangkatan - yang artinya tidak ada perbedaan beban kerja antara satu pangkat akademik dengan pangkat lainnya.

Semangat untuk menghadirkan BKD baru ini layak untuk diapresiasi, namun penting untuk melihat bahwa kedua kebijakan tersebut tidak cukup untuk menjawab persoalan sistemik yang telah dibahas di atas. Tidak hanya itu, fokus pada komposisi rubrik dan pada integrasi sistem informasi di tengah praktik dan tradisi birokrasi yang eksekutif justru dapat menghadirkan risiko dampak yang tidak diharapkan (*unintended consequences*). Studi kasus dari manajemen SDM Universitas Telkom menyimpulkan bahwa situasi kurangnya usaha pengembangan insentif kinerja dan karier dosen dari perguruan tinggi dapat berimbas pada kesejahteraan dosen dan mutu pembelajaran yang didapat mahasiswa (Sujudi 2020). Sehingga, perlu dilakukan penyesuaian ekspektasi kebutuhan individu (dosen) dengan organisasi (perguruan tinggi) sehingga dapat tercipta kondisi keterikatan kerja (atau yang biasa disebut keterikatan kerja, lihat Gozalie 2016).

Untuk mengurai permasalahan implementasi Beban Kerja Dosen dalam lanskap Kampus Merdeka, perlu ada pengakuan dari pemangku kebijakan

bahwa BKD ini mendapatkan dampak dari masalah sistemik bertahun-tahun seperti yang telah diuraikan di sub-bagian sebelumnya. Mengingat Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi saat ini, Nadiem Makarim, tumbuh di dunia start-up (lihat lebih lanjut Siregar, Juliandi, Abdini 2019) yang mengenal adagium "*idea is nothing, execution is everything*", penting untuk memperhatikan bagaimana kebijakan ini diimplementasikan dan diinterpretasikan oleh birokrasi. Meski ide Kampus Merdeka adalah sebuah terobosan yang bagus, dalam konteks kebijakan beban kerja dosen ada dua permasalahan dalam sistem birokrasi yang eksekutif membuat kebijakan ini tidak terimplementasikan dengan baik.

**Pertama**, perubahan kebijakan yang terjadi pada ekosistem pelayanan publik yang tidak berjalan dengan baik. Pandemi Covid-19 juga memperlihatkan fakta pelayanan publik dapat dibuat lebih efisien (Fadlulloh 2020) termasuk dalam birokrasi perguruan tinggi. Perubahan-perubahan kebijakan yang melekat pada proses politik (pergantian pejabat setiap 5 tahun sekali), membuat unit-unit level bawah birokrasi menjadi yang paling terdampak secara beban kerja. Salah satu studi kasus di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya menyimpulkan faktor-faktor penghambat pelayanan administrasi di perguruan tinggi di antaranya adalah sistem yang rigid atau kaku, inefisiensi SOP, dan senioritas dalam struktur birokrasi (Anisah, Haryono dan Midarti 2020). Padahal, birokrasi pendidikan tinggi apabila dikelola secara profesional akan meningkatkan kepuasan akademik mahasiswa, yang dapat meningkatkan daya saing perguruan tinggi (Suffiyah 2011)

Perubahan kurikulum Kampus Merdeka berintensitas untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil pembelajaran di luar kampus, mengurangi beban syarat akreditasi dan mempermudah transisi perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi badan hukum. Namun dalam pelaksanaannya, khususnya kurikulum Kampus Merdeka yang mensyaratkan maksimal 20 SKS di luar prodi, sering berbenturan dengan peraturan teknis yang sudah berlaku di perguruan tinggi. Berdasarkan survei evaluasi program *flagship* Kampus Merdeka yang dilakukan oleh Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan di akhir tahun 2021, mayoritas dosen mengalami kesulitan dalam mengonversi kegiatan Kampus Merdeka ke dalam capaian

<sup>2</sup>Wawancara daring dengan Eko Hadi Sujiono, 18 Januari 2022

pembelajaran lulusan yang telah dirancang oleh perguruan tinggi. Permasalahan konversi SKS ini sering terjadi khususnya pada program studi yang kurikulumnya didesain dalam bentuk structured atau paket seperti program studi pada rumpun kesehatan atau teknik.<sup>3</sup>

**Kedua**, digitalisasi yang mengatur kebijakan sumber daya dosen tidak berjalan dengan lancar. Sistem SISTER yang seharusnya memudahkan integrasi data sering down dan galat, membuat dosen-dosen menghabiskan waktu untuk menyelesaikan hambatan teknis jika menginginkan rekognisi atas beban kerjanya. Selain itu, data sumber daya dosen tidak saling terintegrasi antar satu platform dengan platform yang lain, sehingga dosen harus mengisi data yang sama berulang-ulang untuk kebutuhan birokrasi yang berbeda. Sehingga, perguruan tinggi harus berinovasi untuk mengurangi beban administrasi dosen. Studi kasus dari Politeknik Negeri Bali, pelaporan yang dibebankan ke individu dosen dan tidak terintegrasi ke dalam sistem membuat perguruan tinggi harus berinovasi untuk membuat sistem pelaporannya sendiri (Karma dan Susanti 2015)

## Rekomendasi

Berdasarkan uraian permasalahan di atas kami mendorong Kemendikbudristek untuk mengambil langkah jangka pendek dan jangka panjang sebagai berikut:

### Jangka pendek

- Memperbaiki infrastruktur digital sumber daya dosen (terutama SISTER) dengan mengutamakan kemudahan pengguna (dosen), bukan kemudahan dari kacamata birokrat. Kemendikbudristek direkomendasikan untuk bekerja sama dengan startup teknologi dalam memperbaiki sistem SISTER (contoh PLJ yang menerima dana dari KSI dan Bappenas) - untuk menunjang pelaporan BKD yang lebih efisien.
- Merelaksasi birokrasi penganggaran yang rigid, khususnya dari segi pendanaan untuk mendorong kerja sama internasional, pendidikan, dan pengajaran yang berkelanjutan. Kemendikbudristek didorong untuk membuat aturan yang memungkinkan penelitian dilakukan secara multi tahun dan menyelaraskan

peraturan pendanaan perguruan tinggi yang berasal dari pemerintah dengan Kementerian Keuangan (seperti standar biaya keluaran yang selalu diperbarui setiap tahunnya).

- Melakukan *monitoring* dan evaluasi dampak inisiatif kerja sama perguruan tinggi dan industri yang sudah diluncurkan oleh Kemendikbudristek (Kedai Reka, *competitive fund*) agar jangkauan dampaknya dapat dipertanggungjawabkan dan diperluas.

### Jangka panjang

- Mendorong dan memperbanyak kluster kerja sama ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya di berbagai sektor pengetahuan (perguruan tinggi, pusat unggulan IPTEK, *think tank*, lembaga riset, dan pendanaan internasional). Semakin terkluster kerja sama, proses dan hasil riset akan semakin kuat, mendalam dan mendorong dosen untuk mempunyai *competitive advantage*.
- Menciptakan dan mendorong kondisi profesionalisme di perguruan tinggi yang lebih adil dan terbuka dengan melakukan riset secara komprehensif mengenai sistem predatori dan meritokrasi di kampus-kampus untuk mengurai persoalan ketimpangan relasi kuasa di ekosistem perguruan tinggi Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, kita dapat membangun rencana aksi yang efektif untuk menciptakan profesionalisme di perguruan tinggi.
- Merevisi peraturan dan regulasi yang mengatur beban tri dharma menjadi tanggung jawab perguruan tinggi, tidak hanya menjadi beban dosen. Selain itu, Kemendikbudristek perlu bersinergi secara intensif bersama K/L yang mengatur mengenai sistem SDM di perguruan tinggi.
- Melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap kompensasi finansial bagi dosen yang cenderung masih rendah.

<sup>3</sup>Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan Kampus Merdeka di beberapa siklus kebijakan: November 2020 dan November 2021. Metode yang dilaksanakan dalam monitoring dan evaluasi adalah survei kepada mahasiswa peserta MBKM dan pimpinan prodi, serta wawancara pendalaman. Salah satu temuan dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan PSPK adalah implementasi Kampus Merdeka yang mensyaratkan 20 SKS belajar di luar kampus, memberatkan program studi untuk mereformasi kurikulumnya.



## Referensi

- Abdullah, W. J., & Kim, S. (2020). *Singapore's Responses to the COVID-19 Outbreak: A Critical Assessment*. *The American Review of Public Administration*, 50(6–7), 770–776. <https://doi.org/10.1177/0275074020942454>
- Centre for Innovation Policy and Governance & The Global Development Network. (2020). (rep.). *Doing Research in Indonesia: Country Report*. Retrieved February 2, 2022, from <http://www.gdn.int/sites/default/files/Indonesia%20Country%20Report.pdf>.
- Direktorat jenderal pendidikan tinggi, Riset, Dan Teknologi Bekerja Sama Dengan sekolah ekspor menyelenggarakan program pelatihan "Digital Export Management". Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2021, December 9). Retrieved February 2, 2022, from <https://dikti.kemdikbud.go.id/pengumuman/direktorat-jenderal-pendidikan-tinggi-riset-dan-teknologi-bekerja-sama-dengan-sekolah-ekspor-menyelenggarakan-program-pelatihan-digital-export-management/>
- Direktorat Jendral Anggaran & Direktorat Sistem Penganggaran, Sosialisasi PMK Standar Biaya Keluaran TA 2022 (2021). Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved February 2, 2022, from <https://anggaran.kemenkeu.go.id/api/Medias/3b3a7a2d-2543-4f10-8cd6-0fd06e7338f5>.
- Dzulfikar, L. T. (2019, December 19). Bagaimana skema pengelolaan Dana Abadi Penelitian yang ideal? Komunitas peneliti berpendapat [web log]. Retrieved February 2, 2022, from <https://theconversation.com/bagaimana-skema-pengelolaan-dana-abadi-penelitian-yang-ideal-komunitas-peneliti-berpendapat-129082>.
- Faedlulloh, D. (2020, April 24). Pandemi COVID-19 menunjukkan kerja dari rumah memungkinkan bagi ASN [web log]. Retrieved February 2, 2022, from <https://theconversation.com/pandemi-covid-19-menunjukkan-kerja-dari-rumah-memungkinkan-bagi-asn-136238>.
- Hadiz, V. R., & Dhakidae, D. (2005). *Social Science and power in Indonesia. Social Science and Power in Indonesia*. ISEAS. Retrieved February 2, 2022, from [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WM3\\_uIRJfIkC&oi=fnd&pg=PP1&ots=h2TZnroVUE&sig=gdfiDwUEmtk6limtIRF424F5wkA&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WM3_uIRJfIkC&oi=fnd&pg=PP1&ots=h2TZnroVUE&sig=gdfiDwUEmtk6limtIRF424F5wkA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- How much does your country invest in R&D?* UNESCO UIS. (n.d.). Retrieved February 2, 2022, from <http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/>
- Kampus Merdeka*. Merdeka Belajar : Kampus Merdeka - Direktorat jenderal pendidikan Tinggi Kementerian pendidikan Dan Kebudayaan. (n.d.). Retrieved February 2, 2022, from <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/web/about/latar-belakang>
- Karma, I. G. M., & Susanti, J. (2015). Seminar Nasional dan Pertemuan Peneliti (Senapati). In *PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BEBAN KERJA DOSEN (BKD) UNTUK PELAPORAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI*. Bali; ResearchGate. Retrieved February 2, 2022, from [https://www.researchgate.net/publication/288858272\\_PENGEMBANGAN\\_SISTEM\\_INFORMASI\\_BEBAN\\_KERJA\\_DOSEN\\_BKD\\_UNTUK\\_PELAPORAN\\_PELAKSANAAN\\_TRIDHARMA\\_PERGURUAN\\_TINGGI\\_Development\\_of\\_the\\_Lecturer\\_Workload\\_Information\\_Systems\\_to\\_Report\\_the\\_Implementati\\_on\\_of\\_Tri](https://www.researchgate.net/publication/288858272_PENGEMBANGAN_SISTEM_INFORMASI_BEBAN_KERJA_DOSEN_BKD_UNTUK_PELAPORAN_PELAKSANAAN_TRIDHARMA_PERGURUAN_TINGGI_Development_of_the_Lecturer_Workload_Information_Systems_to_Report_the_Implementati_on_of_Tri).
- Knowledge Sector Initiative (KSI). (2019). (rep.). *Laporan Akhir Studi Diagnostik: Transformasi Tata Kelola Penelitian di Perguruan Tinggi*. Retrieved February 2, 2022, from <https://www.ksi-indonesia.org/assets/uploads/original/2020/05/ksi-1589255924.pdf>.
- Korea. Innovation Policy Platform. (1970, January 1). Retrieved February 2, 2022, from <https://www.innovationpolicyplatform.org/www.innovationpolicyplatform.org/content/korea/index.html>
- National Research Foundation, Prime Minister's Office, Singapore. (2020). *Research, innovation and enterprise 2025 plan - NRF*. Research, Innovation and Enterprise 2025 Plan. Retrieved February 2, 2022, from [https://www.nrf.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/rie\\_booklet\\_fa2021\\_pages.pdf](https://www.nrf.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/rie_booklet_fa2021_pages.pdf)
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106/PMK.02/2016 (2016).
- Rakhmani, I., & Sakhyya, Z. (2021, September 15). *Analysis: Indonesian policymaking is not supported by Quality Research and academic freedom*. *The Conversation*. Retrieved February 2, 2022, from <https://theconversation.com/analysis-indonesian-policymaking-is-not-supported-by-quality-research-and-academic-freedom-126023>
- Rakhmani, I., & Siregar, F. (2016). (working paper). *Global Development Network Working Paper Series Reforming Research in Indonesia: policies and practice*. Global Development Network. Retrieved February 2, 2022, from <http://cipg.or.id/wp-content/uploads/2016/04/GDN-DR-Indonesia.pdf>.
- Siregar, F., Abdini, C., & Juliandi, B. (2019, October 23). Duet Nadiem Makarim dan Bambang Brodjonegoro: andalan Jokowi untuk wujudkan riset kelas dunia [web log]. Retrieved February 2, 2022, from <https://theconversation.com/duet-nadiem-makarim-dan-bambang-brodjonegoro-andalan-jokowi-untuk-wujudkan-riset-kelas-dunia-125739>.
- Sufiyah, A. (2011). *Pengaruh Kualitas Layanan Akademik Dan Birokrasi Terhadap Kepuasan Mahasiswa*, 13(Vol 13 No 2 (2011): Jurnal ASET Volume 13 No 2), 85–93.
- Zamakhshyari, N. S. (2020). (dissertation). *MANAJEMEN DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Sistem Berbasis Life Cycle Dalam Manajemen Dosen Telkom University)*. UPI Repository, Bandung, Indonesia. Retrieved February 2, 2022, from <http://repository.upi.edu/50095/>.

## Disclaimer:

Kilas Kebijakan ini murni merefleksikan pandangan peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) berdasarkan hasil dari studi literatur dan keterlibatan langsung PSPK dalam advokasi Beban Kerja Dosen di lingkup Kemendikbudristek. Kilas Kebijakan ini dapat dikutip, disebar, dan dipergunakan untuk tujuan non-komersial.

## Tentang PSPK:

Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) merupakan yayasan non-profit independen yang berfokus pada penguatan kebijakan pembelajaran yang berpihak pada anak. PSPK berpijak pada data ilmiah, serta menyebarkan praktik baik di lapangan dalam ekosistem pendidikan Indonesia.



### Penulis:

Shofwan Al Banna  
Inaya Rakhmani  
Daya Cipta Sukmajati

### Editor:

Fikri Indra Mualim

### Desainer:

Lulu Safira